

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Afandi, Ali. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahlan Sjarif, Surini. 1982. *Inti Sari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali As-Shabuni, Muhammad. 1995. *Hukum Waris dalam Syariat Islam*. Bandung: CV Diponegoro.
- Ali, Zainudin. 2006. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- K Lubis, Suhardi & Simanjuntak, Komis. *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairul Umam, Dian. 1999. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kuzari, Achmad. 1973. *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*. Beirut: Dar al-jal.
- Muhammad, Bushar. 1991. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Muhammad, M Mizan Asrori Zain. 1981. *Pembagian Pusaka Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Muhibbin, Moh dan Wahid, Abdul. 2009. *Hukum Kewarisan Islam (sebagai Pembaruan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Projodikoro, Wiryono. t.t. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Vorkind Van Hoeve's Graven Hage.
- Rahman, Fatchur. 1975. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Rofiq, Akhmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo.
- Sjarif, Surini Ahlan, 1982, *Inti Sari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suparman, Eman. 2018. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam. Adat dan BW, Cetakan Kelima (Revisi)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syah, Abdullah. 1994. *Hukum Waris Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Fiqh), Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Indonesia Dewasa Ini, Program*

Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Yasir Fauzi, Moh. 2016. Legalisasi Hukum Kewarisan di Indonesia, diakses pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 19.00

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Ibid., hal. 176-179

Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.